



Unit Penelitian dan Penerbitan
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Gadjah Mada

SASDAYA,
Gadjah Mada Journal of Humanities

ISSN: 2548-3218 (print); ISSN : 2549-3884 (online); website: <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal>

- ✎ Nasionalis Pembaru Tanpa Kegaduhan: Biografi Manusiawi Sultan Hamengku Buwono IX
- ✎ Penulis/Author(s) : Bambang Purwanto
- ✎ Sumber/Source : SASDAYA, *Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 2 (May 2018), pp. 471-476
- ✎ Penerbit : Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Copyright (c) 2018 SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

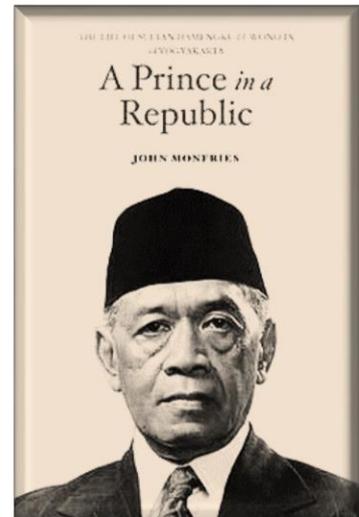
**NASIONALIS PEMBARU TANPA KEGADUHAN:
BIOGRAFI MANUSIAWI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX¹**

Oleh:

Bambang Purwanto²

Identitas Buku:

1. Judul : A Prince in a Republic:
The Life of Sultan Hamengku Buwono IX
of Yogyakarta
2. Penulis : John Monfries
3. Penerbit : Institute of Southeast Asian Studies,
Singapore
4. Tebal : 376 halaman
5. Tahun : 2015
6. ISSN : 978-981-4519-38-0



Ada satu hal yang selalu membekas setiap kali selesai membaca biografi, yaitu muncul kesan betapa pentingnya setiap figur itu di dalam proses sejarah yang dijalaninya. Setiap tokoh yang ada di dalam biografi itu selalu dihadirkan sebagai keutuhan diri yang sempurna, seseorang yang seakan-akan tidak pernah memiliki kekurangan layaknya seperti malaikat. Masing-masing tokoh hadir dengan kebesaran diri yang luar biasa, dan bahkan dalam banyak hal cenderung digambarkan melampaui kenyataan diri sebagai manusia, atau paling tidak seperti manusia super. Akibatnya, intersubjektivitas dalam penulisan sejarah dan mitologisasi atas figur yang

¹ Resensi Buku ini pernah disampaikan pada acara bedah buku *A Prince in a Republic. The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta* karangan John Monfries (Singapore: ISEAS, 2015) yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Yogyakarta 12 April 2015.

² Penulis adalah dosen dan Prof. Sejarah di Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Korespondensi dapat ditujukan ke alamat purwantoug@yahoo.co.uk

menjadi objek tulisan tidak dapat dihindari. Perbedaan antara sejarah sebagai historiografi yang merupakan konstruksi atas kenyataan yang terjadi di masa lalu dengan mitos yang dipenuhi oleh subjektivitas normatif dan sarat dengan kepentingan legitimatif, menjadi sangat tipis. Dalam banyak kasus bahkan sejarah dan mitos bercampur aduk menjadi satu, namun di dalam memori kolektif dipercaya benar-benar sebagai kenyataan masa lalu oleh masyarakatnya.

Kesan yang sama juga tidak terkecuali muncul setelah membaca biografi tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks tradisi historiografi Indonesia, karya-karya biografis itu selalu hadir untuk menunjukkan peran penting yang sudah disumbangkan oleh masing-masing figur mulai dari memperjuangkan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan Indonesia, dalam kerangka besar nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu John Monfries yang menulis buku "*A Prince in a Republic. The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta*", sejak awal telah menyadari betapa pentingnya untuk bersikap kritis dalam menulis biografi agar tidak terjebak dalam penyederhanaan berlebihan atas kenyataan sejarah. Ia melihat narasi besar yang telah menjadi memori kolektif bangsa berkaitan dengan salah seorang pewaris kerajaan Mataram yang lahir tepat 103 tahun lalu pada tanggal 12 April 1915 ini, selama ini dipenuhi oleh label-label dengan ciri-ciri khusus sebagai citra kebesaran seorang pribadi. Padahal mengutip John Monfries, "karir yang panjang dan kompleks dari Hamengku Buwono ditandai oleh berbagai paradoks dan bahkan kontradiksi".

Buku biografi Sultan Hamengku Buwono IX ini pada awalnya merupakan disertasi untuk mendapat gelar doktor di Australian National University beberapa tahun yang lalu. Sebagai sebuah karya akademik, biografi yang diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies Singapura ini berhasil menjaga jarak dengan tokoh yang menjadi objek penelitiannya, walaupun salah satu alasan dari pemilihan tokoh yang akan diteliti adalah kekaguman terhadap pribadi Sultan Hamengku Buwono IX yang belum mendapat perhatian memadai di dalam karya-karya akademik berbahasa Inggris. Berbeda dengan sebagian besar biografi yang ada dalam tradisi historiografi Indonesia yang sejak awal lebih didasarkan pada keinginan untuk menjunjung tinggi atau memuja keberadaan seorang tokoh, sehingga dalam banyak kasus keberadaan biografi-biografi itu merupakan hasil pesanan. Biografi politik yang ditulis oleh mantan diplomat yang lama bertugas di Indonesia ini, dimulai dengan sebuah kerangka berpikir kritis tentang eksistensi Sultan Hamengku Buwono IX, yang digunakan untuk menjawab apa, bagaimana, dan mengapa beliau menjalani karir politiknya "dalam konteks perkembangan baik yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, serta pengaruh dari konteks itu terhadap tindakan-tindakannya". Sebagai figur yang sangat penting di dalam percaturan politik Indonesia dalam jangka waktu yang sangat lama, kehidupan politik Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang aktor dalam sejarah Indonesia ingin dihadirkan John Monfries melalui keadaan yang disebutnya sebagai "peristiwa-peristiwa dramatis dari masanya". Keberadaan biografi ini tidak ditujukan untuk menjelaskan motivasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan Sultan Hamengku Buwono IX selama karir politiknya. Ia lebih menekankan pada usaha untuk menjelaskan "makna dari tindakan-tindakan dan peranan Hamengku Buwono serta pengaruh yang ditimbulkannya terhadap peristiwa-

peristiwa sejarah yang terjadi pada masanya” sebagai seorang royalis di dalam konteks Republik Indonesia.

Berdasarkan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono IX selama proses sejarah sejak tahun 1945 sampai dengan 1988, John Monfries sampai pada kesimpulan bahwa paling tidak secara umum terdapat lima kenyataan sejarah yang terbentuk dari tindakan politik Sultan Hamengku Buwono IX dalam konteks Indonesia dan Yogyakarta. Sampai batas tertentu, kenyataan itu sering diartikan oleh para pengeritiknya sebagai adanya sifat mendua yang konsisten dalam setiap tindakan politik Sultan Hamengku Buwono IX. Sementara itu menurut John Monfries, kenyataan itu menggambarkan kompleksitas kehidupan politik pada setiap masa di sekeliling Sultan Hamengku Buwono IX sebagai praktisi politik yang selalu memiliki cakrawala politik nasional pada satu sisi dan “pangeran Yogyakarta” di sisi yang lain. Setiap pilihan yang diputuskannya merupakan akibat dari perubahan lingkungan sosial dan kultural dimana dia berada di dalamnya, yang bermuara pada keinginan untuk terus menjaga agar tidak tercerabut dari akar historis yang disandangnya sebagai sebuah warisan Mataram dan konsistensinya untuk hidup sebagai seorang Republikan sejati yang sangat diyakininya.

Menurut biografi yang ditulis oleh John Monfries ini, hal pertama yang perlu diperhatikan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX merupakan “seorang ‘pangeran di dalam republik’ dengan segala teka teki konstitusional yang menyertainya”. Ia terus memainkan peranan penting baik di tingkat lokal maupun regional di dalam sebuah negara yang menabukan regionalisme. Melalui tindakan politik yang cerdas, visioner, dan penuh perhitungan, eksistensi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang raja pewaris kekuasaan Jawa Mataram lengkap dengan wilayah kekuasaan, terus dipertahankan dalam konteks Republik Indonesia melalui status keistimewaan. Sebagai kenyataan historis kedua, Sultan Hamengku Buwono IX pada satu sisi tidak ingin menonjolkan dirinya sebagai seorang Sultan, namun di sisi yang lain ia “berprilaku sebagai penguasa feodal di dalam kraton”. Ia mampu menyesuaikan diri dengan mudah hidup diantara dunia Jawa yang tradisional dan kemoderanan dunia Barat. Beliau mampu meyakinkan bahwa ketika para royalis di Indonesia dan bahkan dunia tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau bahkan dipinggirkan, eksistensi dirinya menunjukkan kekuatan status yang diwariskan di tengah berbagai kekacauan politik yang terjadi. Ketiga, Sultan Hamengku Buwono IX merupakan figur yang sangat menonjol dalam politik Indonesia, namun pada saat bersamaan beliau jarang sekali membuat pernyataan-pernyataan politik. Keikutsertaannya secara penuh dalam kehidupan politik selama lebih dari 40 tahun tidak serta merta memunculkan kesan bahwa ia sangat tergantung pada politik. Oleh karena itu Sultan Hamengku Buwono IX secara pribadi sangat jarang menjadi sasaran politik kelompok radikal ketika terjadi gejolak politik nasional, walaupun dalam kenyataannya ia merupakan bagian dari kelompok feodal yang selalu dipersoalkan ketika berkembang tuntutan perlu adanya perubahan. Keempat, Sultan Hamengku Buwono IX diposisikan sebagai seorang “demokrat”, namun ia juga pernah menjadi wakil dari seorang presiden yang dianggap sangat tidak demokratis. Terakhir, Sultan Hamengku Buwono IX seakan-akan berharap dinasti Mataram yang diwarisinya tetap terus hidup di dalam konteks Indonesia, namun ia juga bukan tidak jarang mengirim

tanda bahwa warisan lama itu dapat berakhir kapan saja di tengah-tengah Indonesia yang terus berubah.

Keberadaan berbagai kenyataan di atas yang merupakan bagian dari tindakan politik Sultan Hamengku Buwono IX selama berinteraksi dengan Indonesia menunjukkan, putra dari Raden Ayu Kustilah ini berhasil melewati berbagai tantangan dan terjangan politik tanpa harus kehilangan eksistensi diri dan mengorbankan marwah orang lain untuk menjadi seorang nasionalis Indonesia sejati dan tetap menyandang berbagai atribut warisan kekuasaan Jawa Mataram. Sebagai seorang tokoh dalam sejarah Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX memang dikenang bukan seperti Mohamad Hatta yang piawai dalam administrasi, Soekarno yang penuh kharisma dan seorang orator ulung, sebagai seorang intelektual seperti Sutan Sjahrir, atau seorang komandan tentara yang mumpuni seperti A.H. Nasution. Merujuk pada pendapat John Monfries yang menyatakan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX memang bukan seseorang yang kreatif secara politik, namun ia adalah seorang yang “cerdik secara politik dan pragmatik non-idiologis yang secara cerdas menggunakan warisan statusnya sebagai Sultan tidak hanya untuk mendukung Republikan selama Revolusi tetapi juga untuk memastikan keberlangsungan politiknya, terutama untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya”.

Kemampuan instinktif yang mengetahui terlebih dahulu sebelum sesuatu terjadi *weruh sak durunge winarah* menjadikan Sultan Hamengku Buwono IX selalu dapat memilih jalan yang tepat dalam setiap langkah yang akan dilaluinya di masa depan. Ketika Sultan Hamid II, teman sekolahnya baik ketika berada di Yogyakarta dan di Negeri Belanda yang mendukung negara federal telah sangat yakin bahwa Sultan Hamengku Buwono IX akan mendukung setiap aksi politik dan militer Belanda melawan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, penguasa Kesultanan Pontianak ini harus menghadapi kenyataan bahwa Sultan Yogyakarta ternyata lebih memilih menjadi seorang “pangeran Jawa Republikan” daripada menyeberang ke pihak Belanda yang sejak akhir tahun 1948 menduduki ibukota Republik Indonesia di masa Revolusi itu. Sebuah konstruksi identitas sebagai Indonesia telah benar-benar mengkristal, identitas utama yang terus dibawa dan ingin diwariskan oleh Sultan Hamengku Buwono IX, baik kepada masyarakat Yogyakarta umumnya maupun para penerus identitas Jawa di lingkaran dalam Kasultanan Yogyakarta.

Perjalanan panjang yang ditempuh oleh Sultan Hamengku Buwono IX dalam karir politiknya baik dalam konteks Yogyakarta maupun Indonesia ditandai oleh kehadirannya sebagai pembaru. Latar belakang royalis yang disandangnya tidak menghambat dirinya hadir dengan tindakan-tindakan politik yang biasanya tidak dilakukan oleh mereka yang berasal dari kelompok yang sama. Dalam konteks Yogyakarta sebagai contoh, diterimanya Pangeran Diponegoro ke dalam ruang sosio-kultural Yogyakarta hanya dapat dilakukan ketika Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh seorang pembaru, menyusul latar belakang adanya tirai dan kabut hitam yang membatasi kraton dengan sang pangeran yang mengobarkan Perang Jawa di dekade ketiga awal abad ke-19 itu. Biarpun terlambat dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, karena kebesaran hati yang merupakan salah satu ciri dari sifat pembaru akhirnya kota Yogyakarta secara resmi memiliki nama jalan Diponegoro. Sultan Hamengku Buwono IX juga ingin membangun sebuah tradisi baru ketika pada

bulan Februari 1988 ia mengajak Paku Alam VIII untuk menyerahkan kekuasaan mereka baik sebagai penguasa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sebagai penguasa kraton Jawa kepada para penggantinya. Sayangnya keinginan itu tidak pernah tercapai, beberapa waktu kemudian di bulan Oktober 1988 Sultan Hamengku Buwono IX meninggal dunia di Amerika Serikat sebelum pelimpahan kekuasaan itu sempat diwujudkan.

Hal itu bukan berarti Sultan Hamengku Buwono IX tidak pernah gagal secara politik. Ketidaktepatan dirinya sebagai Menteri Pertahanan membaca konteks politik yang ada di sekitar aksi tentara yang merespon rasionalisasi ditubuh tentara dalam peristiwa Oktober 1952, harus dibayar mahal dengan tidak harmonisnya hubungan dengan Presiden Soekarno. Walaupun dalam konteks lain di kemudian hari, ia mendapat apresiasi dan simpati dari elite tentara karena sikapnya yang bersimpati terhadap berbagai persoalan ketentaraan. John Monfries juga melihat keputusan Sultan Hamengku Buwono IX untuk berkarir di Jakarta dan menyerahkan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Paku Alam VIII telah mengakibatkan Yogyakarta “terjerembab dalam kondisi stagnan”. Keberadaan berbagai kebijakan baru yang dijalankan di propinsi ini sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an bukan merupakan inisiatif dari adanya kepemimpinan yang kuat di dalam propinsi itu, melainkan sekedar pelaksanaan program-program pemerintah pusat.

Dalam konteks yang lain lagi, Sultan Hamengku Buwono IX juga dianggap tidak mampu mengoptimalkan keberadaannya sebagai Wakil Presiden pada masa Orde Baru. Ia digambarkan oleh John Monfries sebagai wakil Soeharto yang “berkedudukan tapi tidak memiliki kekuasaan”. Sebagai presiden, Soeharto hanya memberikan sedikit pengaruh dan kekuasaan kepada Sultan Hamengku Buwono IX yang menjadi wakilnya, keadaan yang kemudian dipercaya menjadi alasan utama dari berakhirnya kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX bersama Soeharto di bawah rezim Orde Baru. Walaupun merasa tidak puas terhadap sikap Soeharto, Sultan Hamengku Buwono IX tidak pernah menyatakannya secara terbuka. Seperti yang diceritakan oleh Robert Elson dalam biografi tentang Soeharto, Sultan Hamengku Buwono IX hanya mengirimkan pesan simbolik kepada Soeharto melalui keputusan pengunduran diri yang sangat singkat, hanya beberapa saat sebelum keputusan untuk mengangkat dirinya sebagai Wakil Presiden untuk yang kedua kalinya diumumkan.

Sebagai catatan akhir, kekuatan utama dari biografi politik ini terletak pada kemampuannya untuk tetap menghadirkan citra positif Sultan Hamengku Buwono IX dalam konteks sejarah Indonesia walaupun di dalamnya terdapat berbagai hal yang mudah dianggap sebagai kekurangan sang tokoh. Seperti kata pepatah *tak ada gading yang tak retak*, Sultan Hamengku Buwono IX juga manusia. Oleh karena itu di dalam biografi ini terdapat banyak pernyataan dan kenyataan sejarah yang dipastikan sangat tidak mudah dapat diterima oleh para “diehard”, para pendukung yang hanya mau mendengar dan membaca kelebihan dari seorang tokoh sejarah yang dipujanya. Terlepas dari berbagai tinjauan kritis yang ada di dalam biografi ini, kebesaran Sultan Hamengku Buwono IX sebagai nasionalis dan pembaru baik dalam konteks sejarah Yogyakarta maupun sejarah Indonesia tetap lebih menonjol dan tidak tergantikan, *harimau mati meninggalkan belang* *gajah mati meninggalkan gading* *manusia*

mati meninggalkan nama. Nama besar Sultan Hamengku Buwono IX sebagai nasionalis Indonesia sejati yang tidak pernah melupakan asal usul kejawamataramannya tidak akan hilang oleh tinjau kritis atas tindakan-tindakan politik dalam konteks masanya. Oleh karena itu penterjemahan biografi ini ke dalam bahasa Indonesia dan Jawa menjadi sesuatu yang sangat direkomendasi, agar masyarakat terbiasa dengan historiografi yang manusiawi dan cerdas tanpa harus bertengkar tentang mitos. Walaupun begitu ada satu syarat yang perlu diperhatikan jika buku ini akan diterjemahkan. Proses penterjemahan memerlukan seorang penterjemah yang benar-benar mumpuni dalam bidang sejarah atau ilmu-ilmu sosial-humaniora lain di samping kemampuan bahasa Inggris, mengingat biografi ini ditulis dengan narasi literer dalam bahasa Inggris yang tidak begitu saja mudah dipahami oleh pembaca walaupun mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris.